



BerAKHLAK
Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan
Wawasan keadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2022

 0622 7550426

 pn.simalungun

 info@pn-simalungun.go.id

 www.pn-simalungun.go.id



BerAKHLAK
Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan
Wawasan Keadilan Adil dan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2022

 **0622 7550426**

 **pn.simalungun**

 **info@pn-simalungun.go.id**

 **www.pn-simalungun.go.id**

PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



DR. NURNANINGSIH AMRIANI, S. H., M. H.
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



GOLOM SILITONGA, S. H., M. H.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, S.E.
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



AMIRUDDIN, S.H., M. H.
PANITERA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 selesai disusun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2021 kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

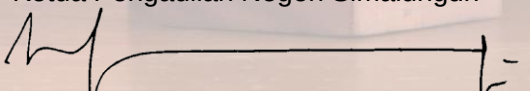
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Simalungun kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Sebagai penutup tahun 2022, Pengadilan Negeri Simalungun kembali berhasil meraih prestasi *"green flag"* penyelesaian perkara dengan nilai 92,22 persen. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga berhasil mempertahankan akreditasi dengan predikat *"A"* (*Excellent*). Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan namun juga sekaligus sebagai cambukan bagi Pengadilan Negeri Simalungun agar dapat terus melaksanakan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Simalungun : **"BERAKSI"** : **"Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, dan Inovatif"**.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2023, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kabupaten Simalungun khususnya dan di Indonesia pada umumnya, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Salam Sehat, Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatu,
Om santi santi om
Pengadilan Negeri Simalungun, BERAKSI !

Simalungun, 4 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun


Dr. NURNANINGSIH AMRIANI, S.H., M.H.

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan terletak di jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Simalungun saat ini memiliki 42 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang Hakim, 26 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNNPN).

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Simalungun tersebut maka ditetapkan 4 (Empat) misi, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan pengguna layanan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan dengan menciptakan inovasi yang memudahkan bagi masyarakat. Inovasi - inovasi tersebut antara lain Brodi (Brosur Digital), Pagnas Online (Formulir Elektronik Untuk Pengajuan Permohonan Penggeledahan, Penyitaan, dan Penahanan Secara Online), E-3P (Elektronik Persiapan Penyelenggaraan

Persidangan) dan E-Pelita (Elektronik Permohonan Salinan Putusan), E-Pesona (Elektronik Penilaian Personal), Syparis (System Pembayaran dengan Qris) dan masih banyak yang lainnya.

Pengadilan Negeri Simalungun mengelola 2 (dua) DIPA yaitu dari Badan Urusan Administrasi dengan Nomor: DIPA-005.01.2.400370/2022 tanggal 17 November 2021 dengan total pagu Rp. 5.585.705.000,- yang terdiri dari Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.535.205.000,- dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 50.500.000,-. Sedangkan DIPA dari Badan Peradilan Umum dengan Nomor DIPA-005.03.2.400371/2022 tanggal 17 November 2021 memiliki pagu sebesar Rp. 336.100.000,- yang seluruhnya merupakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melakukan penyerapan anggaran yang optimal yaitu DIPA 01 sebesar 99,91 % dan DIPA 03 sebesar 99,94%.

Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Agustus 2022, berhasil mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar sebagai Satuan Kerja Kerja Terbaik Ketiga dalam 4 (empat) Kategori, yaitu :

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2022 dalam kategori Pagu DIPA Kelolaan Sangat Kecil;
2. Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Digital *Payment-Marketplace* Semester 1 Tahun Anggaran 2022;
3. Pengelolaan Data Capaian Output Semester 1 Tahun Anggaran 2022;
4. Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan APBN Semester 1 Tahun Anggaran 2022 dalam kategori Pagu DIPA Kelolaan Sangat Kecil.

DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
Daftar Isi	1
BAB I Pendahuluan	2
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	5
C. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun	6
D. Budaya Kerja	6
E. Motto	7
F. Rencana Strategis (RENSTRA).....	8
BAB II	
A. Keadaan Perkara	11
B. Penyelesaian Perkara	14
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Putus	14
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	15
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	16
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi	15
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi	18
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	19
1. Posbakum	19
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	19
3. Perkara Prodeo	19
BAB III Sumber Daya Manusia	21
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	22
1. Mutasi	25
2. Promosi	25
3. Pensiun	26
4. Diklat	26
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	
1. Pengelolaan Keuangan	30
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	38
3. Pengelolaan Teknologi Informasi	43
- Implementasi Ecourt	44
- Implementasi SIPP	45
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	48
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	59
C. Inovasi Pelayanan Publik	61
BAB VI Pengawasan	
1. Internal	68
2. Evaluasi	69
BAB VII Penutup	
1. Kesimpulan	73
2. Rekomendasi	74
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022	11
Tabel 2. Implementasi E-Court Tahun 2022.....	11
Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022	11
Tabel 4. Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 202	12
Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2022.....	12
Tabel 6. Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2022	12
Tabel 7. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2022	13
Tabel 8. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2022	13
Tabel 9. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2022.....	13
Tabel 10. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus	14
Tabel 11. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus	15
Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu	15
Tabel 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	16
Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	16
Tabel 15. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	16
Tabel 16. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	16
Tabel 17. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	16
Tabel 18. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.....	18
Tabel 19. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi	18
Tabel 20. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Divers	18
Tabel 21. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2022	19
Tabel 22. SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang	22
Tabel 23. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat	23
Tabel 24. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 25. Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2022	24
Tabel 26. Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2022	24
Tabel 27. Rekapitulasi Mutasi Tahun 2022	25
Tabel 28. Rekapitulasi Promosi Tahun 2022	26
Tabel 29. Rekapitulasi Pensiun Tahun 2022.....	26
Tabel 30. Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2022.....	26
Tabel 31. Rekapitulasi Diklat Tahun 2022	26
Tabel 32. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2022	28
Tabel 33. Realisasi Anggaran DIPA 400370 Tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun.....	30
Tabel 34. Realisasi Anggaran DIPA 400371 Tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun	33
Tabel 35. Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2022	38
Tabel 36. Keadaan Rumah Dinas TA. 2022	38



<i>Tabel 37. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2022</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 38. Perangkat Keras IT Pengadilan Negeri Simalungun TA. 2022</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 39. Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2022</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 40. Rata-rata Scor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Desember 2022</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 41. Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2022</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 42. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat</i>	<i>68</i>
<i>Tabel 43. Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022</i>	<i>69</i>

Daftar Gambar

Gambar 1. Misi Pengadilan Negeri Simalungun	5
Gambar 2. Motto. Pengadilan Negeri Simalungun	7
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun	21
Gambar 4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun	23
Gambar 5 Pengumuman Penghargaan dari KPPN	35
Gambar 6 Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar	36
Gambar 7 Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar	36
Gambar 8 Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar	37
Gambar 9 Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar	37
Gambar 10 Pelaksanaan Vaksin	40
Gambar 11 Surat Keterangan Vaksin Covid-19	41
Gambar 12 Sarpras Preventif Covid -19	41
Gambar 13 Penyerahan Paket COVID-19 Kepada Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun	42
Gambar 14 Pelaksanaan Swab Antigen Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun	42
Gambar 15 Peta E-Court Peradilan Umum Se-Indonesia	44
Gambar 16 Tampilan Screenshot SIPP Pengadilan Negeri Simalungun	45
Gambar 17. Tampilan Screenshot MIS Pengadilan Negeri Simalungun	46
Gambar 18. Rapat Unit Kesekretariatan	49
Gambar 18. Pelaksanaan Audit Internal oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kesekretariatan	50
Gambar 19. Rapat Pleno Bulanan	51
Gambar 20. Rapat TIM RBI dalam Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan	52
Gambar 21. Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun	52
Gambar 22. Ruang PTSP PN Simalungun	52
Gambar 23. Ruang Sidang Cakra	52
Gambar 24. Ruang Tunggu Ramah Anak	52
Gambar 25. Ruang Tunggu Jaksa dan Advokat	53
Gambar 26. Ruang Mediasi	53
Gambar 27. Ruang Kaukus dan Ruang Laktasi	54
Gambar 28. Ruang Merokok	54
Gambar 29. Area Parkir	54
Gambar 30. Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER	54



<i>Gambar 31. Pelaksanaan Audit Internal oleh Hakim Pengawas Bidang</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 32. Rapat Tinjauan Manajemen</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 33. Pelaksanaan Assessment oleh Pengadilan Tinggi Medan</i>	<i>58</i>
<i>Gambar 34. Struktur Tim APM Pengadilan Negeri Simalungun</i>	<i>59</i>
<i>Gambar 35. Tampilan Ruang PTSP Pengadilan Negeri Simalungun</i>	<i>60</i>
<i>Gambar 36. Deskripsi Inovasi E-Pelita</i>	<i>61</i>
<i>Gambar 37. Deskripsi Inovasi E-Pesona</i>	<i>62</i>
<i>Gambar 38. Deskripsi Inovasi Syparis</i>	<i>62</i>
<i>Gambar 39. Deskripsi Inovasi Pagnas+ Online</i>	<i>63</i>
<i>Gambar 40. Deskripsi Inovasi Brodi</i>	<i>63</i>
<i>Gambar 41. Deskripsi Inovasi Pangsid</i>	<i>64</i>
<i>Gambar 42. Deskripsi Inovasi E-Checklist</i>	<i>64</i>
<i>Gambar 43. Deskripsi Inovasi E3P</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 44. Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 45. Duta E-Court.....</i>	<i>66</i>

Bab 1

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Simalungun merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Simalungun harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Simalungun menurun dibanding Tahun sebelumnya. Pengadilan Negeri Simalungun juga telah melaksanakan sidang perkara pidana secara *online* sejak pertengahan tahun 2020 dan berlanjut dengan adanya *e-litigasi* di tengah maraknya wabah COVID-19.

Ketua Mahkamah Agung memperkuat payung hukum pelaksanaan sidang secara elektronik dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang disahkan tanggal 20 September 2020 dan Surak Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

1. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Program tunggakan minutasi nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
3. Program sistem pelayanan satu pintu (*one stop integrated service*) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola secara satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada *website* Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B “www.pn-simalungun.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;
5. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan di sekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
6. Program Standarisasi Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri;
7. Pelaksanaan penyelesaian perkara secara mediasi;
8. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan atau bimbingan teknis;

Sasaran akhir dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan;
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun, adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu

Gambar 1. Misi Pengadilan Negeri Simalungun



C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.

D. BUDAYA KERJA.

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparaturnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

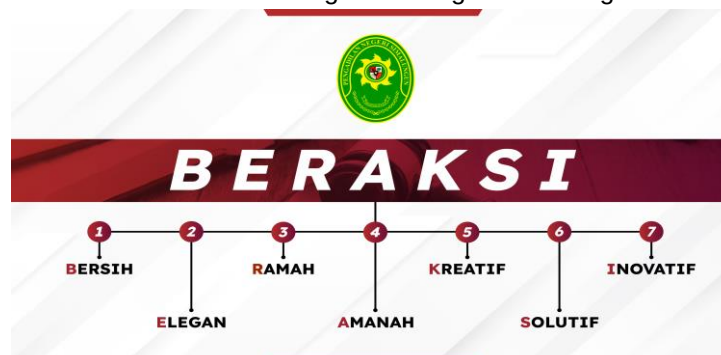
Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

1. Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;
2. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
3. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
4. Malu bekerja tidak berprestasi;
5. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
6. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrama dan tidak berpakaian sopan santun;
7. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
8. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.

E. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah “**BERAKSI**” yang merupakan akronim dari “**Bersih Elegan Ramah Amanah Kreatif Solutif dan Inovatif**”.

Gambar 2. Motto Pengadilan Negeri Simalungun



F. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Simalungun perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Simalungun yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Simalungun;

Bab 2

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



- A. Keadaan Perkara
- B. Penyelesaian Perkara
- C. A P M

**A. KEADAAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2022

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Perkara Perdata

Tabel 1. Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perdata Gugatan	37	155	192	11	139	42
2	Perdata Permohonan	4	224	228	22	206	0
3	Gugatan Sederhana	2	4	6	2	4	0
4	Perlawanan/Derden Verzet		1	1	0	0	1
5	PHI	0	0	0	0		0
6	Permohonan Konsinyasi	0	28	28	0	28	0
7	Eksekusi	5	25	30	1	3	26

Statistik Implementasi E-Court Pengadilan Negeri Simalungun

Tabel 2. Implementasi E-Court Tahun 2022

No.	Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
1	Pengadilan Negeri Simalungun	358	387.352.000	138	215	1	4	358
	Jumlah	358	387.352.000	138	215	1	4	358

b. Keadaan Perkara Pidana

Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana Biasa	22	330	352	-	334	18
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	7	7	-	7	-
4	Lalu Lintas	-	54	54	-	54	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	12	12	-	12	-
7	Pidana Peradilan	1	5	6	-	6	-

b. Keadaan Perkara Pidana Kasasi :

Tabel 7. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana Biasa	5	57	62	5	26	31
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-	-	1
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2022

a. Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) :

Tabel 8. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perdata Gugatan	5	4	9	0	3	6
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/ Deden Verzet	1	0	1	0	1	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	6	4	10	0	4	6

b. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali (PK) :

Tabel 9. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana Biasa	-	1	1	1	-	1
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

**B. PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN****1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus**

Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022. Berikut uraian setiap jenis perkara di Pengadilan Negeri Simalungun;

a. Perkara Perdata :

Tabel 10. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Sisa Tahun 2021 Yang Dicabut 2022	Sisa Tahun 2021 Yang Diputus 2022	Sisa Perkara 2022 Yang Belum Putus
1	Perdata Gugatan	37	3	37	42
2	Perdata Permohonan	4	1	4	0
3	Gugatan Sederhana	2	0	2	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	1
5	PHI	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0
Jumlah		43	4	43	43

b. Perkara Pidana :

Tabel 11. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Sisa Tahun 2021 Yang Dicabut 2022	Sisa Tahun 2021 Yang Diputus 2022	Sisa Perkara 2022 Yang Belum Putus
1	Pidana Biasa	22	-	22	18
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	1	-	1	0
Jumlah		23	0	23	18

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai berikut :

a. Perkara Perdata :

Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban Perkara Tahun 2022	Perkara Yang Diputus Tahun 2022	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	37	155	192	149	128	21
2	Perdata Permohonan	4	224	228	228	228	0
3	Gugatan Sederhana	2	4	6	6	6	0
4	Perlawanan/ Derden Verzet	1	1	1	1	1	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	28	28	28	28	0
Jumlah		44	412	455	412	391	21

b. Perkara Pidana :

Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban Perkara Tahun 2022	Perkara Yang Diputus Tahun 2022	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	22	330	352	334	334	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	7	7	7	7	-
4	Lalu Lintas	-	54	54	54	54	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	12	12	12	12	-
7	Pidana Peradilan	1	5	6	6	6	-
Jumlah		23	408	431	431	413	-

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.

Berikut adalah jumlah perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2022 :

a. Upaya Hukum Banding

❖ Perkara Perdata :

Tabel 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata Gugatan	37	150	48	102
2	Perdata Permohonan	4	228	0	0
3	Gugatan Sederhana	2	6	0	0
4	Perlawanan/ Deden Verzet	0	1	1	0
5	PHI	0	0	0	0
Jumlah		43	385	49	102

❖ Perkara Pidana:

Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	13	334	83	264
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	7	-	7
4	Lalu Lintas	-	54	-	54
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	2	12	1	13
7	Pidana Praperadilan	-	6	-	6
Jumlah		15	413	84	344

b. Upaya Hukum Kasasi

❖ Perkara Perdata :

Tabel 15. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata Gugatan	12	38	22	16
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0
Jumlah		12	38	22	16

❖ Perkara Pidana:

Tabel 16. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	7	79	57	29
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-
7	Pidana Praperadilan	-	-	-	-
Jumlah		7	7	80	58

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

❖ Perkara Perdata :

Tabel 17. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2022 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2022 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2022
1	Perdata Gugatan	6	16	11	4	7
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0
Jumlah		6	16	11	4	7

❖ Perkara Pidana :

Tabel 18. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2022 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2022 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2022
1	Pidana Biasa	238	29	20	1	287
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	7	-	-	-	7
4	Lalu Lintas	54	-	-	-	54
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	10	-	-	-	10
7	Pidana Praperadilan	6	-	-	-	6
Jumlah		315	29	20	1	364

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berhasil di Mediasi Tahun 2022 :

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2022	Status				
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	Proses Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	78	3	0	73	0	2
Jumlah		78	3	0	73	0	2

Tabel 19. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berhasil melalui diversi pada tahun 2022 :

Tabel 20. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Pidana Anak 2022	Jumlah Perkara Diversi 2022	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	12	-	-	-	-
Jumlah		12	-	-	-	-

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU SERTIFIKAT ISO PENGADILAN

1. Posbakum

Tabel 21. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan				
			Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	LBH SUMUT MANDIRI	312	31.200.000	31.200.000	0

Jenis layanan yang diberikan oleh POSBAKUM adalah :

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Simalungun tidak melaksanakan sidang keliling/ pelayanan terpadu sepanjang tahun 2022 karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, selain itu juga tidak tersedia anggaran DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2022.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022 nihil karena tidak pengajuan pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2022. Selain daripada itu tidak tersedia anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2022.

Bab 3

Sumber Daya Manusia

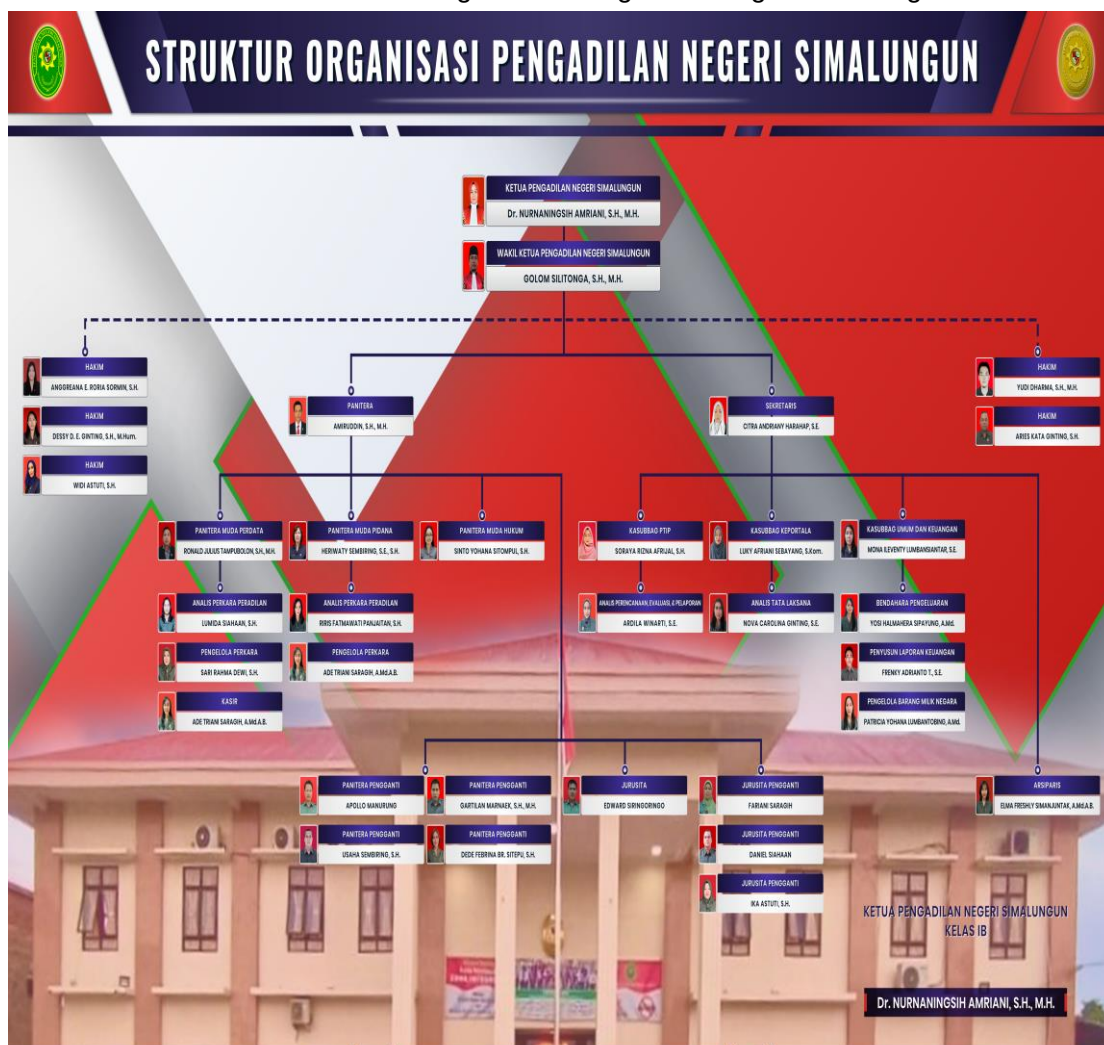


SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi baik institusi ataupun yang lainnya sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkannya.

Pengadilan Negeri Simalungun merupakan salah satu instansi pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan publik, dimana pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pegawai Negeri Simalungun) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan dengan baik sehingga menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima.

Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



Tabel 22. SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/ Gol Ruang

Tingkat Jabatan	Jumlah Jabatan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I B	1
Wakil Ketua Tingkat Pertama	1
Panitera Tingkat Pertama Kelas I B	1
Hakim Tingkat Pertama	5
Sekretaris Tingkat Pertama Kelas I B	1
Kepala Sub Bagian	3
Panitera Muda Tingkat Pertama Kelas I B	3
Panitera Pengganti Tingkat Pertama	4
Penyusun Laporan Keuangan	1
Pengelola Perkara	2
Bendahara Tingkat Pertama	1
Juru Sita	1
Analisis Perkara Peradilan	2
Arsiparis Pelaksana	1
Analisis Tata Laksana	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pel...	1
Juru Sita Pengganti	3

Tabel 23. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat

No	Jabatan	Pangkat							
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
1	Ketua								1
2	Wakil Ketua								1
3	Hakim						5		
4	Panitera							1	
5	Sekretaris						1		
6	Panitera Muda						2	1	
7	Kasubbag					3			
8	Panitera Pengganti				1	3			
9	Jurusita				1				
10	Jurusita Pengganti			1	1	1			
11	Pelaksana	4		5	1				
Jumlah		4		6	4	7	8	2	2

Tabel 24. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan				
		SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Ketua					1
2	Wakil Ketua				1	

3	Hakim			3	2	
4	Panitera				1	
5	Sekretaris			1		
6	Panitera Muda			2	1	
7	Kasub. Bag			3		
8	Panitera Pengganti	1		2	1	
9	Jurusita	1				
10	Jurusita Pengganti	2		1		
11	Pelaksana		4	6		
Jumlah		4	4	18	6	1

➤ Mutasi

Mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada tahun 2022 Hakim dan Pegawai yang mutasi adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk

Tabel 25. Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2022

No	Nama/ NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Heriwaty Sembiring, S.E, S.H. NIP.196611101993032002	III/d	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
2	Gartilan Marnaek, S.H, M.H. NIP. 198712122011011009	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun
3	Golom Silitonga, S.H, M.H. NIP. 197507062001121001	IV/b	Ketua Pengadilan Negeri Tarutung	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
4	Amiruddin, S.H, M.H. NIP.197008221991031001	IV/a	Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
5	Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H. NIP.198207092006041003	IV/a	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tarutung	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun

Mutasi Keluar

Tabel 26. Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2022

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Paringatan Saragih, S.H. NIP.196503021993031008	III/d	Panitera Muda Pidana	Panitera Muda Hukum

Tabel 28. Rekapitulasi Promosi Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Jabatan				Jumlah
		Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Panmud	
	PN Simalungun	1	1	1	2	5

➤ **Pensiun**

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Rekapitulasi Pensiun Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Sebab Pensiun			Jumlah
		Batas Usia	Meninggal	Pensiun Dini	
	PN Simalungun	1	1	-	2

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yang pensiun Tahun 2022 :

Tabel 30. Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2022

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan	TMT Pensiun
1	Kasiah NIP.196811211991032001	III/c	Pengadministrasi Persuratan Pengadilan Negeri Simalungun	1 April 2022
2	M Ramli NIP. 196205251981031003	III/c	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun	1 Juni 2022

➤ **Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Rekapitulasi Diklat SDM Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Jenis Diklat					
		Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Diklat Manajemen	Latsar CPNS
1	PN Simalungun	-	-	17	-	13	5

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 :

Tabel 32. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2022

No	Nama/NIP	Nama Diklat	Penyelenggara
1	Mince S. Ginting, S.H, M.Kn. NIP.198206172006042004	Uji Kelayakan dan kelayakan bagi Pimpinan PN Kelas II	Mahkamah Agung
2	Golom Silitonga, S.H, M.H. NIP. 197507062001121001	Pelatihan Aparatur Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan	BALITBANG KUMDIL MARI
3	Aries Kata Ginting, S.H. NIP.198004072007041001	Pelatihan Explorasi Pelanggaran KEEPH	Komisi Yudisial
4	Anggreana E. Roria Sormin, S.H. NIP.198210062006042005	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana bagi Hakim Peradilan Umum	BALITBANG KUMDIL MARI
5	Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum. NIP.198112192007041001	Sertifikasi Hakim Perikanan	BALITBANG KUMDIL MARI
6	Robin Nainggolan, S.H, M.H. NIP.196510101998031004	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
7	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	<i>Supporting Champion Meeting Court Exellent Training</i>	BALITBANG KUMDIL MARI
8	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Online Pengembangan Kapasitas Bagi Fasilitator (TOT)	BALITBANG KUMDIL MARI
9	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pengajar Muatan Lokal Administrasi Umum Latsar CPNS	BALITBANG KUMDIL MARI
10	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Sertifikasi Profesional Trainer bagi Pengajar Muatan Lokal	BALITBANG KUMDIL MARI
11	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Online Manajemen BMN	BALITBANG KUMDIL MARI
12	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Online Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik	BALITBANG KUMDIL MARI
13	Jonathan Sinaga. S.H. NIP.196503051998031001	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
14	Sinto Yohana Sitompul, S.H. NIP.198609012009042007	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
15	Heriwyat Sembiring, S.E, S.H. NIP.196611101993032002	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
16	Soraya Rizna Afrijal, S.H. NIP. 199110032014032004	<i>Champion Meeting Court Exellent Training</i>	BALITBANG KUMDIL MARI
17	Luky Afriani Sebayang, S.Kom. NIP. 198404152009122003	<i>Champion Meeting Court Exellent Training</i>	BALITBANG KUMDIL MARI
18	Luky Afriani Sebayang, S.Kom. NIP. 198404152009122003	Penyusunan SPIP Integratif	BALITBANG KUMDIL MARI
19	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E. NIP.198505112011012023	Penyusunan SPIP Integratif	BALITBANG KUMDIL MARI
20	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E. NIP.198505112011012023	Pelatihan Online Manaiemen BMN	BALITBANG KUMDIL MARI



21	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E. NIP.198505112011012023	Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja	BALITBANG KUMDIL MARI
22	Jonny Sidabutar, S.H. NIP.1966033187031003	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
23	Apollo Manurung/ NIP.196907251994031003	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
24	Usaha Sembiring, S.H. NIP.197503132009121002	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
25	Dede Febrina BR Sitepu, S.H. NIP.198902221011012004	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
26	Gartilan Marnaek, S.H, M.H. NIP. 198712122011011009	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
27	M. Ramli NIP. 196205251981031003	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG KUMDIL MARI
28	Nova Carolina Ginting, S.E. NIP.198711222019032006	<i>E-learning</i> Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	KEMENKEU
29	Frenky Adrianto Tampubolon, S.E. NIP. 199410242020121009	Latsar CPNS	BALITBANG KUMDIL MARI
30	Frenky Adrianto Tampubolon, S.E. NIP. 199410242020121009	<i>E-learning</i> Bendahara Pengeluaran	KEMENKEU
31	Ardila Winarti, S.E. NIP. 1994032022032009	Latsar CPNS	BALITBANG KUMDIL MARI- KEMENAG
32	Yosi Halmahera Sipayung, A.Md. NIP. 199512062019032005	<i>Champion Meeting Court Exellent Training</i>	BALITBANG KUMDIL MARI
33	Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B NIP. 199810262020122001	Latsar CPNS	BALITBANG KUMDIL MARI
34	Patricia Y. Lumbantobing, A.Md. NIP.199604212022032010	Latsar CPNS	BALITBANG KUMDIL MARI- KEMENAG
35	Ade Triani Saragih, A.Md.A.B NIP.199908312022032008	Latsar CPNS	BALITBANG KUMDIL MARI- KEMENAG



Bab 4

Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Negeri Simalungun mengelola 2 (dua) DIPA yaitu dari Badan Urusan Administrasi dengan Nomor: DIPA-005.01.2.400370/2022 tanggal 17 November 2021 dengan total pagu Rp. 5.585.705.000,- yang terdiri dari Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.535.205.000,- dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 50.500.000,-. Sedangkan DIPA dari Badan Peradilan Umum dengan Nomor DIPA-005.03.2.400371/2022 tanggal 17 November 2021 memiliki pagu sebesar Rp. 336.100.000,- yang seluruhnya merupakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 33. Realisasi Anggaran DIPA 400370 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5.585.705.000	5.580.833.102	99,91	4.871.898	0,09
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.585.705.000	5.580.833.102	99,91	4.871.898	0,09
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.535.205.000	5.530.333.102	99,91	4.871.898	0,09
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.535.205.000	5.530.333.102	99,91	4.871.898	0,09
1066.EBA.962	Layanan Umum	5.000.000	5.000.000	100,00	-	0,00
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00	-	0,00
A	Penanggulangan COVID-19	2.135.000	2.135.000	100,00	-	0,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.135.000	2.135.000	100,00	-	0,00
B	Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabe	2.865.000	2.865.000	100,00	-	0,00
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabe	2.865.000	2.865.000	100,00	-	0,00



1066.EBA.99 4	Layanan Perkantoran	5.530.205.000	5.525.333.102	99,91	4.871.898	0,09
001	Gaji dan Tunjangan	4.104.795.000	4.101.514.370	99,92	3.280.630	0,08
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.104.795.000	4.101.514.370	99,92	3.280.630	0,08
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.730.131.000	1.727.671.680	99,86	2.459.320	0,14
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	23.581	94,32	1.419	6,02
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	107.970.000	107.969.280	100,00	720	0,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35.945.000	35.943.400	99,99	1.600	0,01
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00	-	0,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.590.155.000	1.590.155.000	100,00	-	0,00
511125	Belanja Tunj. PPH PNS	182.165.000	182.164.169	100,00	831	0,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	94.364.000	94.363.260	100,00	740	0,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	295.680.000	294.864.000	99,72	816.000	0,28
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	31.960.000	31.960.000	100,00	-	0,00
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.425.410.000	1.423.818.732	99,89	1.591.268	0,11
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	439.413.000	439.284.054	99,97	128.946	0,03
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	350.209.000	350.080.750	99,96	128.250	0,04
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29.184.000	29.183.304	100,00	696	0,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00	-	0,00
B	Langganan Daya dan Jasa	298.603.000	298.469.776	99,96	133.224	0,04
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.750.000	170.741.489	100,00	8.511	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.360.000	6.353.550	99,90	6.450	0,10
522111	Belanja Langganan Listrik	117.753.000	117.725.439	99,98	27.561	0,02
522112	Belanja Langganan Telepon	1.140.000	1.098.558	96,36	41.442	3,77
522113	Belanja Langganan Air	600.000	550.740	91,79	49.260	8,94



522141	Belanja Sewa	2.000.000	2.000.000	100,00	-	0,00
C	Pemeliharaan Kantor	516.735.000	516.059.314	99,87	675.686	0,13
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284.100.000	283.951.559	99,95	148.441	0,05
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	79.391.000	79.286.228	99,87	104.772	0,13
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	153.244.000	152.821.527	99,72	422.473	0,28
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	69.730.000	69.080.000	99,07	650.000	0,94
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24.190.000	24.190.000	100,00	-	0,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.540.000	44.890.000	98,57	650.000	1,45
G	Rapat Koordinasi Internal	5.676.000	5.675.986	100,00	14	0,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.676.000	5.675.986	100,00	14	0,00
H	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	63.010.000	63.006.982	100,00	3.018	0,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.430.000	59.426.982	99,99	3.018	0,01
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.580.000	3.580.000	100,00	-	0,00
I	Konsultasi kw KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL	6.643.000	6.643.000	100,00	-	0,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.643.000	6.643.000	100,00	-	0,00
J	Penanganan COVID-19	25.600.000	25.599.620	100,00	380	0,00
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	23.100.000	23.099.620	100,00	380	0,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.500.000	2.500.000	100,00	-	0,00

1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	50.500.000	50.500.000	100,00	-	0,00
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.500.000	50.500.000	100,00	-	0,00
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50.500.000	50.500.000	100,00	-	0,00
052	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	50.500.000	50.500.000	100,00	-	0,00
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	50.500.000	50.500.000	100,00	-	0,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.000	50.500.000	100,00	-	0,00
JUMLAH TOTAL		5.585.705.000	5.580.833.102	99,91	4.871.898	0,09

Tabel 34. Realisasi Anggaran DIPA 400371 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	336.100.000	335.899.710	99,94	200.290	0,06
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	336.100.000	335.899.710	99,94	200.290	0,06
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	336.100.000	335.899.710	99,94	200.290	0,06
1049.AEA	Koordinasi	5.500.000	5.500.000	100,00	0	0,00
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	5.500.000	5.500.000	100,00	0	0,00
051	Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara	4.000.000	4.000.000	100,00	0	0,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	4.000.000	4.000.000	100,00	0	0,00
521211	Belanja Bahan	1.100.000	1.100.000	100,00	0	0,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.900.000	2.900.000	100,00	0	0,00
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0,00
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	299.400.000	299.199.710	99,93	200.290	0,07
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	299.400.000	299.199.710	99,93	200.290	0,07



051	Pendaftaran Berkas Perkara	149.328.000	149.328.000	100,00	0	0,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	149.328.000	149.328.000	100,00	0	0,00
521211	Belanja Bahan	5.063.000	5.063.000	100,00	0	0,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	144.265.000	144.265.000	100,00	0	0,00
052	Penetapan hari sidang	150.000	000	0,00	150.000	100,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	150.000	000	0,00	150.000	100,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	000	0,00	150.000	100,00
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	44.313.000	44.313.000	100,00	0	0,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	44.313.000	44.313.000	100,00	0	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	663.000	663.000	100,00	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.650.000	43.650.000	100,00	0	0,00
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	50.000	000	0,00	50.000	100,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	50.000	000	0,00	50.000	100,00
521211	Belanja Bahan	50.000	000	0,00	50.000	100,00
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	34.635.000	34.634.710	99,98%	290	0,02%
A	TANPA SUB KOMPONEN	34.635.000	34.634.710	99,98%	290	0,02%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.485.000	1.484.710	99,98%	290	0,02%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.150.000	33.150.000	100,00	0	0,00
056	Minutasi/Upaya hukum	12.505.000	12.505.000	100,00	0	0,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	12.505.000	12.505.000	100,00	0	0,00
521211	Belanja Bahan	12.505.000	12.505.000	100,00	0	0,00
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	32.219.000	32.219.000	100,00	0	0,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	32.219.000	32.219.000	100,00	0	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.919.000	1.919.000	100,00	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.300.000	30.300.000	100,00	0	0,00
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan	26.200.000	26.200.000	100,00	0	0,00

	Tingkat pertama					
A	TANPA SUB KOMPONEN	26.200.000	26.200.000	100,00	0	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.600.000	4.600.000	100,00	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000	21.600.000	100,00	0	0,00
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	31.200.000	31.200.000	100,00	0	0,00
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100,00	0	0,00
051	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100,00	0	0,00
A	TANPA SUB KOMPONEN	31.200.000	31.200.000	100,00	0	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00	0	0,00
JUMLAH TOTAL		336.100.000	335.899.710	99,94%	200.290	0,06%

Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Agustus 2022, berhasil mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar sebagai Satuan Kerja Kerja Terbaik Ketiga dalam 4 (empat) Kategori, yaitu :

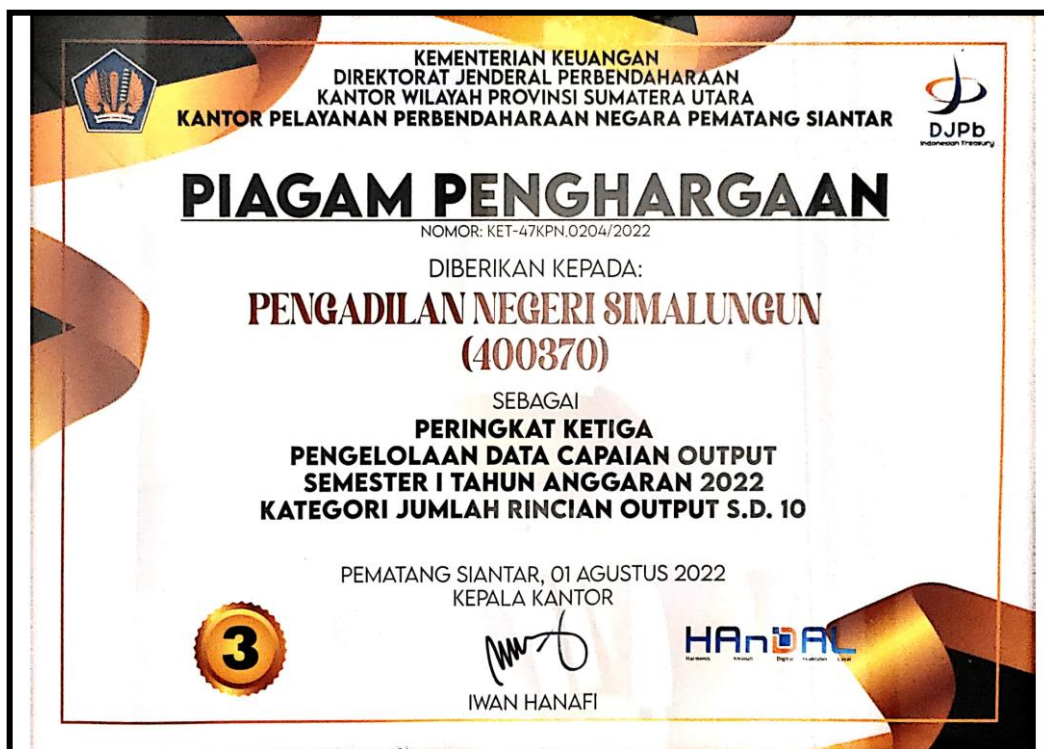
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2022 dalam kategori Pagu DIPA Kelolaan Sangat Kecil
2. Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Digital *Payment-Marketplace* Semester 1 Tahun Anggaran 2022
3. Pengelolaan Data Capaian Output Semester 1 Tahun Anggaran 2022
4. Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan APBN Semester 1 Tahun Anggaran 2022 dalam kategori Pagu DIPA Kelolaan Sangat Kecil

Prestasi ini merupakan suatu keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengelola keuangan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 5. Pengumuman Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar kepada Satuan Kerja Yang Berprestasi dalam Pengelolaan Keuangan.



Gambar 6. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.



Gambar 7. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.



Gambar 8. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.



Gambar 9. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.



B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Kendaraan Dinas

Tabel 35. Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2022:

NO	URAIAN	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1	Kijang Innova 1002 T	2008		✓		MARI
2	Kijang Innova 1265 T	2011	✓			MARI
II	Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro 2376 T	2008	✓			MARI
2	Supra 125 2377 T	2008	✓			MARI
3	Supra 125 2006 T	2006	✓			MARI
4	Supra 125 2005 T	2006	✓			MARI

b. Rumah Dinas

Tabel 36. Keadaan Rumah Dinas TA. 2022.

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	7	7			

c. Sarana Dan Prasarana

Tabel 37. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2022.

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Sarana Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Kepaniteraan	-	
9	Ruang Tahanan	3	
10	Ruang Umum dan Keuangan	1	
11	Ruang Kepegawaian	1	
12	Ruang PTIP	1	
13	Ruang Perpustakaan	1	
14	Ruang Arsip	1	
15	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1	
16	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1	

17	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
18	Ruang Mediasi, Diversi dan Kaukus	1	
19	Ruang Ramah Anak	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Tunggu Jaksa	1	
22	Ruang Tunggu Advokat	1	
23	Ruang Laktasi dan Kesehatan	1	
II	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	P.C Unit	27	
2	Lap top	19	
3	LCD Monitor	10	
4	Tablet PC	1	
5	A.C Split	19	
6	Faximile	2	
7	Genset	1	
8	Printer	10	
9	CPU	1	
10	Scanner	2	
11	Server	4	
12	Router	1	
13	CCTV	1	
14	Mesin Absensi	1	
15	Mesin Antrian	1	
16	Tape Recorder	1	
17	Loudspeaker	5	
18	Sound System	1	
19	Microphone	2	
20	Microphone Table Stand	6	
21	Mic Conference	3	
22	Microphone/Wireless MIC	1	
23	Audio Amplifier	1	
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
25	Video Monitor	1	
26	Camera Conference	1	
27	Telephone Mobile	1	
28	Local Area Network (LAN)	1	
29	Komputer Jaringan Lainnya	1	
30	CPU	1	
31	Firewall	1	
32	Wireless Acces Point	12	
33	Switch	10	
34	Ethernet Converter	7	
35	Lemari Kayu	21	
36	Rak Besi	2	
37	Filling Cabinet Besi	12	
38	Brankas	1	
39	White Board	3	
40	Meja Kerja Kayu	56	
41	Kursi Besi/Metal	64	
42	Kursi Kayu	8	
43	Sice	4	
44	Bangku Panjang Besi/Metal	4	

45	Bangku Panjang Kayu	18	
46	Meja Rapat	2	
47	Meja Resepsionis	1	
48	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	
49	Alat Kantor Lainnya	1	
50	Kipas Angin	10	
51	Tiang Bendera	11	
52	Palu Sidang	2	
53	Lambang Instansi	1	
54	Bracket Standing Peralatan	1	
55	Rak Peralatan	1	
56	Kursi Zeis	10	
57	Rak Server	4	
58	Monografi	53	

Selain sarana dan prasarana di atas yang sudah dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun terdapat pula berbagai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang baru merebak diseluruh dunia sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun memiliki kesiapan dalam menangani penyebaran virus Covid-19, yakni dengan melakukan vaksin booster (vaksin covid-19 dosis ke-3) kepada seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN pada Pengadilan Negeri Simalungun dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Gambar 10. Pelaksanaan Vaksin terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun



Gambar 11. Surat Keterangan Vaksin COVID-19 Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun



2. Sarana dan Prasarana, meliputi Sarana dan Prasarana Preventif, serta Pembiayaan

Pengadilan Negeri Simalungun menyediakan tempat cuci tangan, thermogun, penyemprot disinfektan secara berkala, penyekat akrilik PTSP, Sarana sidang online pidana, dan mesin *handsanitizer* otomatis yang tersedia didepan pintu masuk PTSP.

Gambar 12. Sarpras Preventif COVID-19



3. Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan yang dilakukan setiap pengunjung yang masuk melakukan cuci tangan dan cek suhu tubuh terlebih dahulu serta harus menggunakan masker, menjaga jarak, serta terdapat tanda untuk *physical distancing*, pemberian paket covid-19 berupa vitamin,

penambah imun dan masker kepada seluruh Hakim, Pegawai dan PPNP setiap tiga bulan sekali.

Gambar 13. Penyerahan Paket COVID-19 Kepada Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun



4. Penanganan saat bencana (misalnya ada yang terpapar Covid 19, atau salah satu keluarganya)

Pengadilan Negeri Simalungun melakukan *swab antigen* untuk Hakim dan Pegawai dan juga memberlakukan WFH isolasi mandiri bagi Hakim atau Pegawai yang keluarganya terpapar Covid-19.

Gambar 14. Pelaksanaan Swab Antigen Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun



C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Simalungun menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing – masing aplikasi dilakukan secara rutin. Pengadilan Negeri Simalungun telah dilengkapi dengan sistem IT yang mumpuni, berikut perangkat keras IT yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun :

Tabel 38. Daftar Perangkat Keras IT Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022

No	Nama Barang	Type/Merk	Keterangan
1	Server	Server <i>fujitsu</i> RX2520M5 32 GB	server Tipe A Satker 3T
2	Server	Server RX2520M5 w/win storage server	Server Storage Eselon 1
3	Laptop	Fujitsu intel core i3	Laptop
4	Rak server	AR3104 RAK dan PDU - APC	Rak Server Room
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS - APC SMT2200RM12UNC	UPS
6	Rak Server	Indorack RAK PDU	Rack Network Wallmount
7	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Distribusi Tipe 2
8	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Access PoE
9	Ethernet Converter	Ruckus 10GbE Direct Attach 10G-SFPP-TWX-0101	DAC
10	Wireless Access Point	Ruckus R550-WW00	Access Point
11	Firewall	Palo Alto Networks PA-220	Firewall

Pengadilan Negeri Simalungun juga dilengkapi dengan jaringan internet menggunakan provider fibernet, dengan kecepatan 100 Mbps *dedicated*. Tentu saja hal itu sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri Simalungun yang saat ini menggunakan SIPP versi 5.1.0 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 5.1.0 Versi tersebut

merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

➤ Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Simalungun

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan dengan menerima pendaftaran perkara perdata melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id dan juga telah melaksanakan persidangan secara e-litigasi. Adapun data perkara yang melalui e-court dan e-litigasi adalah sebagai berikut :

Tabel 39. Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2022

No	Perkara	Perkara Masuk	E-Court	E-Litigasi
1	Gugatan	16	138	2
2	Permohonan	9	215	0
3	Gugatan Sederhana	0	4	0
4	Bantahan	0	1	0
Jumlah		25	358	2

Gambar 15. Peta E-Court Peradilan Umum Se-Indonesia



Sebagai salah satu dukungan terhadap implementasi *e-Court*, Pengadilan Negeri Simalungun juga telah menyediakan Meja *e-Court* dan Duta *E-Court* dimana para calon pengguna terdaftar dan atau pengguna lain dapat dibantu untuk proses mendapatkan akun. Selain itu, Meja *e-Court* juga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Terdaftar dan atau Pengguna Lain untuk mendaftarkan perkaranya.

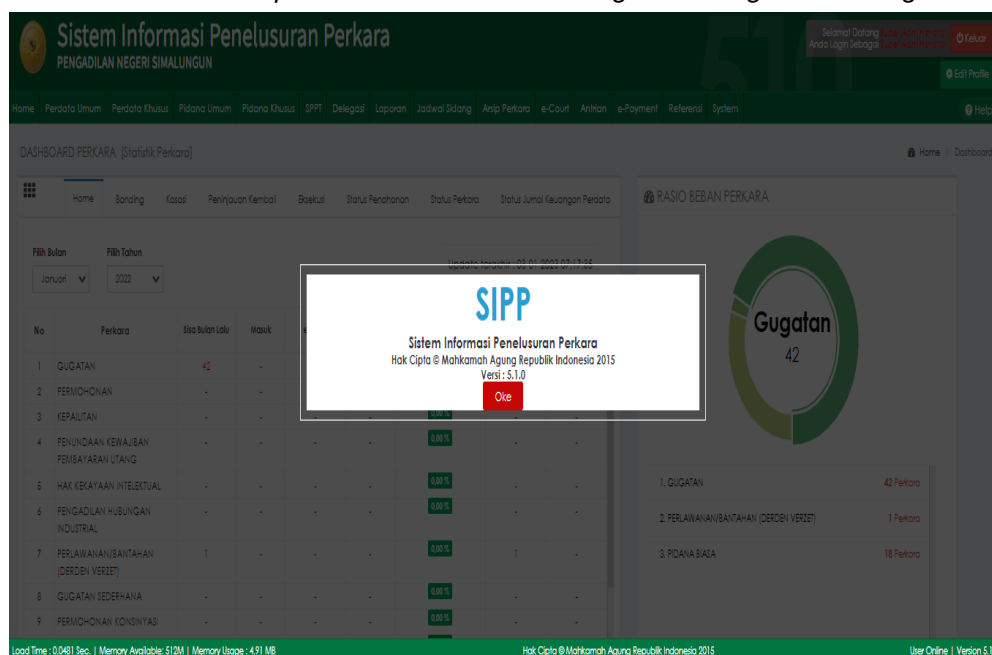
Banner dan brosur yang memuat berbagai informasi tentang *e-Court* juga tersedia pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun.

Saat ini sudah tidak ada kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Simalungun dalam implementasi *e-court* dan *e-litigasi* karena para pencari keadilan sudah banyak yang melek teknologi dan merasakan kemudahan dan manfaat yang luar biasa dengan adanya *e-court* dan *e-litigasi*.

➤ Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun saat ini menggunakan SIPP versi 5.1.0 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 5.1.0 Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

Gambar 16. Tampilan Screenshot SIPP Pengadilan Negeri Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun rutin melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi SIPP setiap bulan melalui Rapat Pleno Bulanan. Pada tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mencapai *green flag* dengan capaian nilai penanganan perkara 92,22% dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 65 berkas perkara. Ini merupakan peningkatan kinerja yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022, dimana ditahun sebelumnya Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh nilai penanganan perkara 91,15%. Hal ini terjadi tentunya berkat kerjasama dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun yang bahu membahu berupaya mewujudkan peningkatan penanganan perkara.

Gambar 17. Tampilan Screenshot MIS Pengadilan Negeri Simalungun



Bab 5

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



B A B V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai dengan standart sertifikasi ISO 9001 : 2008. Tujuan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu pada setiap badan Peradilan di Indonesia, khususnya Badan Peradilan Umum adalah untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (*Indonesian Court Performance Excellent-ICPE*).

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A (*Excellent*) yang diserahkan Dirjen Badan Peradilan Umum di Makassar pada tanggal 28 November 2018. Pada bulan November tahun 2022 telah dilakukan *surveillance* akreditasi yang kedua dan Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mempertahankan predikat tersebut dengan nilai akreditasi 716.

Untuk dapat tetap mempertahankan predikat tersebut ini, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari Pimpinan sampai dengan PPNPN di Pengadilan Negeri Simalungun. Beberapa langkah tersebut adalah :

1. Pembinaan dan sosialisasi terus menerus yang berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransfromasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali yakni setiap awal bulan. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus Panitera dengan para Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga PPNPN di Pengadilan Negeri Simalungun yang dilakukan setiap bulan juga.

Gambar 18. Rapat Unit Kesekretariatan



Gambar 19. Rapat Pleno Bulanan



2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi pada Pengadilan Negeri Simalungun

telah dibentuk melalui SK Ketua Pengadilan Negeri No. 50/KPN/SK/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri No. 50/KPN/SK/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2000 tentang *Grand Design RB*, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Gambar 20. Rapat TIM RBI dalam Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan



4. Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan zona integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak Kepolisian, Kejaksaan,

dan pihak Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021.

Gambar 21. Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun



5. Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan telah dilakukan dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana dan prasarana harus rapi dan bersih. Sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan konsep 5 R yaitu pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ruang Sidang, Ruang Ramah Anak, Ruang Tahanan, Ruang Penuntut Umum, Ruang Laktasi, Ruang Mediasi, Ruang Kaukus, Ruang Pengunjung berikut fasilitasnya, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Posbakum, Sarana Disabilitas, Tempat Parkir Pengunjung dan Mobil Tahanan, serta Tempat Merokok. Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Juga telah tersedia televisi di ruang pengunjung, CCTV, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan genset.

Gambar 22. Ruang PTSP PN Simalungun



Gambar 23. Ruang Sidang Cakra



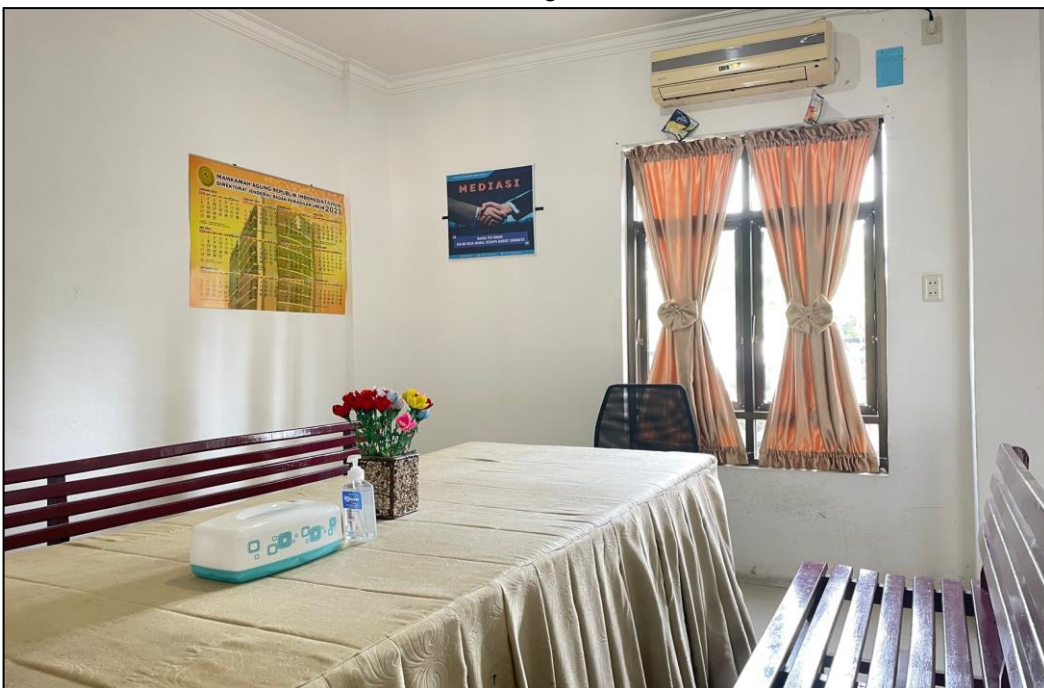
Gambar 24. Ruang Tunggu Ramah Anak



Gambar 25. Ruang Tunggu Jaksa dan Advokat



Gambar 26. Ruang Mediasi



Gambar 27. Ruang Kaukus dan Ruang Laktasi



Gambar 28. Ruang Merokok

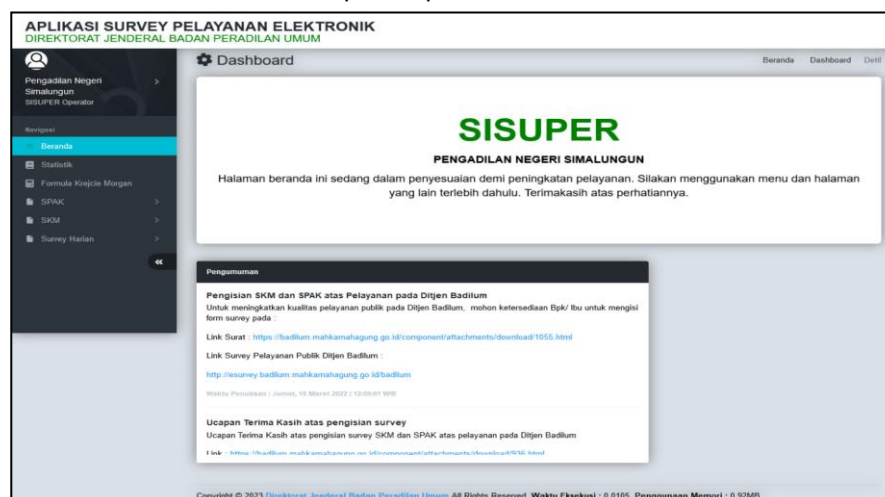


Gambar 29. Area Parkir



6. Pembenahan administrasi. Administrasi di Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini sudah diterapkan dalam praktek sehari-hari sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.
7. Pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, Instruksi Kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk tim Penyusunan SOP yang berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Tim penyusun SOP terdiri dari pejabat dan pegawai dari unit yang bersangkutan.
8. Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Manual Mutu Pengadilan Negeri Simalungun telah disusun berdasarkan *template* yang diberikan Badilum.
9. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat dua kali dalam setahun sejak tahun 2016. Survei dilaksanakan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan secara elektronik dengan aplikasi SiSUPER. Pelaksanaan survei dilakukan empat kali dalam setahun sejak tahun 2021 sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badilum dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Gambar 30. Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022 triwulan pertama yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 yaitu 3,92 (tiga koma sembilan dua) atau 98,05% (sembilan puluh delapan koma lima) dalam kategori sangat baik, pada triwulan II yang dilaksanakan pada bulan Juni 2022 nilainya 3,92 (tiga koma sembilan dua) atau 97,94 (sembilan puluh tujuh koma sembilan empat) termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dan pada triwulan III dilaksanakan pada September 2022 dengan nilai 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) atau 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga).

*Tabel 40. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Desember 2022*

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,933	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3,893	Sangat Baik	9
3.	Waktu Pelayanan	3,9	Sangat Baik	8
4.	Biaya dan Tarif	3,98	Sangat Baik	5
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,987	Sangat Baik	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3,993	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,993	Sangat Baik	3
8.	Sarana dan Prasarana	3,98	Sangat Baik	6
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4	Sangat Baik	1

10. Pelaksanaan audit internal. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan audit internal oleh para hakim penagwas bidang kepada unit kepaniteraan dan kesekretariatan dengan tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Gambar 31. Pelaksanaan Audit Internal oleh Hakim Pengawas Bidang



11. Pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal juga menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Gambar 32. Rapat Tinjauan Manajemen



11. Asessment oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan *assessment* oleh TAPM – Badilum, telah dilakukan asesmen oleh Pengadilan Tinggi Medan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 33. Pelaksanaan Assessment oleh Pengadilan Tinggi Medan



Rekomendasi Pengadilan Tinggi Medan juga telah seluruhnya ditindaklanjuti. Pengadilan Negeri Simalungun sejak tahun 2017 selalu dinilai memenuhi syarat dan telah mendapat akreditasi dari TAPM Badilum.

12. Audit akreditasi TAPM - Badilum. Telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, dimana hasilnya adalah minim ketidaksesuaian dan selalu berhasil mendapat Nilai A dengan skor 716 pada tahun 2022.

Adapun struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/KPN/SK/ 11/2022 tanggal 28 November 2022 adalah sebagai berikut;

Gambar 34. Struktur Tim APM Pengadilan Negeri Simalungun



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, yang merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, sudah aktif dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B Nomor 7/KPN/SK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada ketentuan yang ada pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tata ruang PTSP Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan tersebut. Pada tahun 2019, PTSP dilengkapi dengan Meja Inzaghe dan Meja e-Court sesuai amanat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Gambar 35. Tampilan Ruang PTSP Pengadilan Negeri Simalungun



Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 41. Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Jumlah Layanan di PTSP	Jumlah Permohonan Layanan	Keterangan
1	PN Simalungun	4	Hukum : 2085 Pidana : 663 Perdata : 503 Umum : 2312	-

C. Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Simalungun

1. Latar Belakang

Sebagai instansi yang bertugas melayani masyarakat, Pengadilan Negeri Simalungun terus meningkatkan pelayanan publik dengan membuat inovasi, baik dari fasilitas yang ada, maupun dari pelayanannya. Hal ini tak lain sebagai salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung yaitu Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan pelayanan yang prima. Pengadilan Negeri Simalungun juga memberikan informasi secara online yaitu bisa melalui website dan media sosial lainnya.

1. Jenis Inovasi Pelayanan publik

a. E-Pelita

Gambar 36. Deskripsi Inovasi E-Pelita



b. E- Pesona

Gambar 37. Deskripsi Inovasi E-Pesona

e-Pesona (Elektronik Form Penilaian Personal)



Form elektronik penilaian personal untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyanggah disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebelum berkunjung ke Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna Inovasi :
Kelompok rentan khususnya penyanggah disabilitas.

CARA KERJA

Pengguna layanan mengakses e-Pesona melalui <https://bit.ly/e-Pesona> atau dengan memindai QR code pada brosur e-Pesona melalui ponsel pintar.

Pada tampilan formulir e-Pesona, pengguna layanan mengisi data-data yang diperlukan serta menjawab pertanyaan sesuai dengan jenis dan kebutuhan disabilitas.

Pengguna lalu mengirimkan form permohonan dengan menekan tombol *submit* atau kirim.

Formulir penilaian personal yang telah dikirimkan akan diterima dan diproses oleh Petugas PTSP sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

PETUGAS / OPERATOR

Petugas PTSP.

c. Syparis

Gambar 38. Deskripsi Inovasi Syparis

S Y P A R I S



Merupakan metode pembayaran panjar biaya perkara perdata secara *easy pay* menggunakan QRIS, dimana pihak berperkara dapat melakukan pembayaran dengan memindai QR code melalui berbagai platform pembayaran digital.

Pengguna Inovasi :
Pihak yang melakukan pendaftaran perkara perdata

CARA KERJA

Pengguna layanan masuk / login ke aplikasi pembayaran digital yang mendukung metode pembayaran dengan menggunakan QRIS.

Pengguna layanan kemudian memindai QR code yang telah tersedia pada flyer QRIS melalui fitur *scan QRIS* pada aplikasi pembayaran digital yang digunakan.

Pengguna layanan memasukkan nominal panjar biaya perkara perdata yang harus dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera pada SKUM, kemudian melakukan autentikasi transaksi dengan memasukkan PIN / passcode pada aplikasi pembayaran yang digunakan.

Apabila transaksi berhasil dilakukan, pengguna layanan akan menerima notifikasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan.

Selanjutnya pembayaran akan dicek oleh Kasir untuk kemudian diproses sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

PETUGAS / OPERATOR

Kasir.

f. Pangsid

Gambar 41. Deskripsi Inovasi Pangsid

PANGSSID (Panggilan Suara Sidang)



Aplikasi panggilan suara (announcer) yang digunakan untuk mempermudah melakukan panggilan kepada para pihak yang akan bersidang di Pengadilan Negeri Simalungun, terutama untuk perkara perdata.

Pengguna Inovasi :
Para pihak yang akan bersidang.

CARA KERJA

PANGSSID merupakan aplikasi untuk menyuarakan panggilan sidang yang dapat diakses oleh petugas jaga sidang melalui alamat <https://192.168.1.106/pangsid>.

PANGSSID dapat digunakan untuk memanggil para pihak yang akan mengikuti persidangan, mengumumkan panggilan untuk rapat bulanan, apel, maupun panggilan kustom lainnya.

Untuk menyuarakan panggilan sidang, petugas jaga sidang dapat memilih nomor perkara sesuai dengan antrian sidang, kemudian memilih para pihak yang akan dipanggil (Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, atau para pihak yang berperkara).

Untuk panggilan kustom lainnya, petugas jaga sidang dapat mengetikkan kalimat yang akan diumumkan melalui menu "Kustom Panggil". Kalimat tersebut kemudian akan disuarakan secara otomatis oleh announcer pada aplikasi PANGSSID.

Adapun untuk menu Panggilan Sidang, PANGSSID telah terintegrasi dengan data dari SIPP Pengadilan Negeri Simalungun.

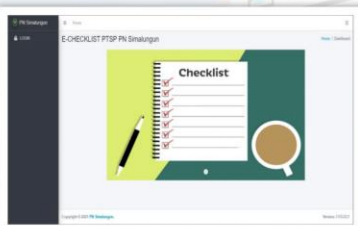
PETUGAS / OPERATOR

Petugas Jaga Sidang.

g. E- Checklist

Gambar 42. Deskripsi Inovasi E-Checklist

E - CHECKLIST (Electronic Checklist)



Aplikasi yang memudahkan petugas PTSP dalam memeriksa kelengkapan berkas - berkas yang diajukan oleh pengguna layanan.

Pengguna Inovasi :
Panitera
Panmud Perdata
Petugas PTSP Meja Perdata
Staf Perdata

CARA KERJA

Petugas PTSP bagian Perdata dapat mengakses e-Checklist melalui alamat <https://192.168.1.106/e-checklist>.

E-Checklist akan menampilkan checklist yang berisi daftar persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengguna layanan PTSP bagian Perdata sesuai dengan SPP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

Apabila persyaratan yang diminta telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, petugas akan memberikan tanda check pada poin yang sesuai di tampilan E-Checklist.

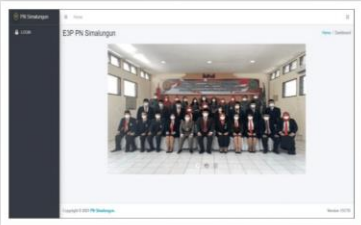
Petugas dapat mengetahui lengkap atau tidaknya persyaratan atas suatu layanan yang diminta dengan melihat poin - poin pada checklist tersebut.

PETUGAS / OPERATOR

Petugas PTSP Bagian Perdata.

h. E3P

Gambar 43. Deskripsi Inovasi E3P



E3P (Elektronik Persiapan Penyelenggaraan Persidangan)

Aplikasi berbasis data SIPP yang berguna untuk memberitahukan status kehadiran para pihak pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim dan Panitera secara *real-time*, khususnya untuk perkara Perdata.

Pengguna Inovasi :

- Hakim
- Panitera Pengganti
- Petugas Sidang

CARA KERJA

Petugas jaga sidang dapat mengakses E3P melalui alamat <https://192.168.1.106/E3P>.

Petugas dapat *login* dengan menggunakan user petugas.

Petugas kemudian memilih menu "Lapor Kesiapan Sidang", kemudian memilih menu "Lapor Persidangan".

Petugas memilih nomor perkara para pihak yang telah hadir dan siap untuk mengikuti sidang, kemudian mengisi menu "Kehadiran" dengan nama para pihak yang telah hadir beserta keterangan kehadirannya.

Simpan, kemudian tekan tombol "Kirim".

E3P akan secara otomatis mengirimkan notifikasi bahwa persidangan dapat segera dimulai melalui aplikasi **Telegram** kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara tersebut.

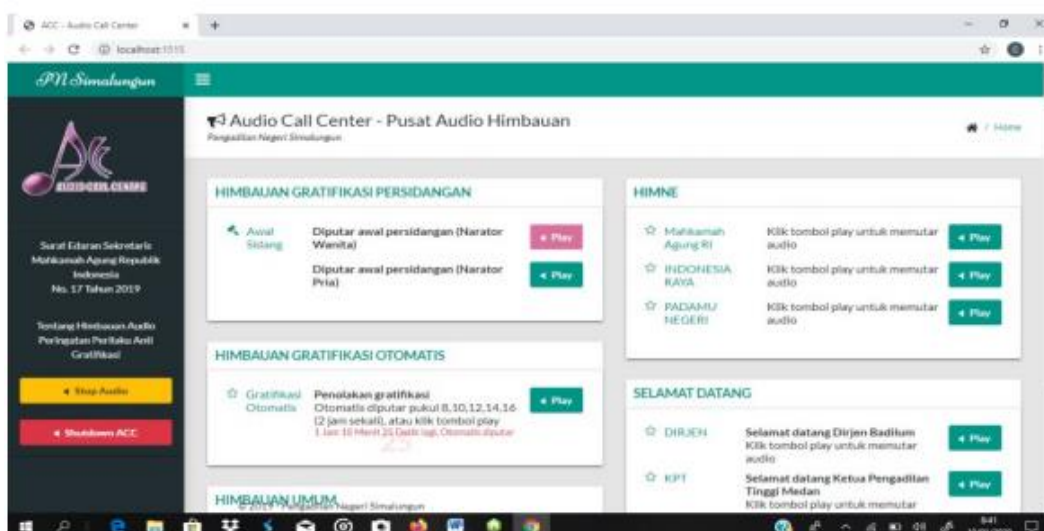
PETUGAS / OPERATOR

Petugas Jaga Sidang.

i. Audio Gratifikasi

Sesuai SE SEKMA RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, Pengadilan Negeri Simalungun telah memiliki aplikasi yang memudahkan implementasi SEMA tersebut setiap dua jam sekali.

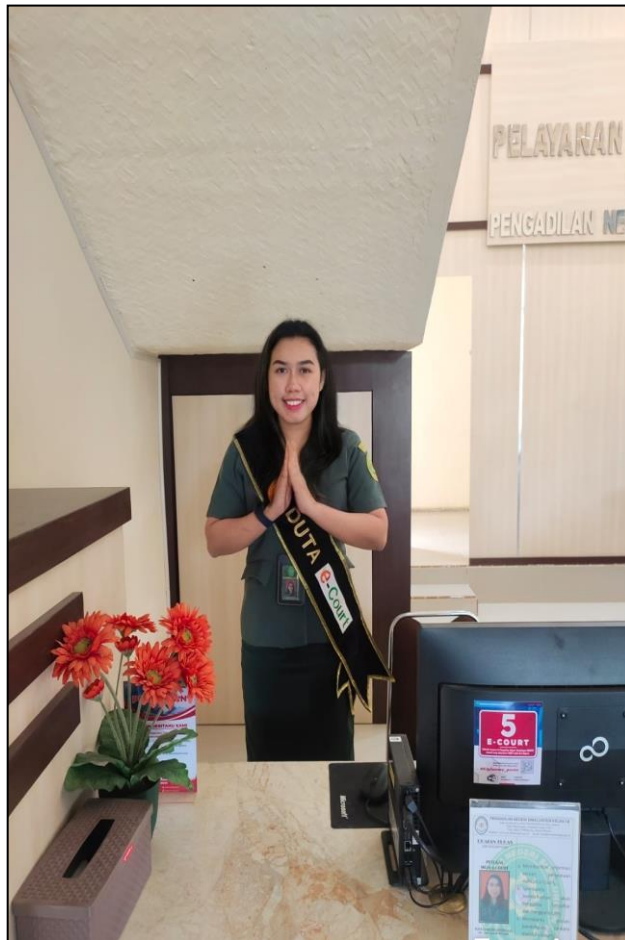
Gambar 44. Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi



j. Duta E-Court

Salah satu upaya untuk semakin meningkatkan penggunaan e-Court, Pengadilan Negeri Simalungun telah menyediakan Meja e-Court yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit PC, yang bertujuan memudahkan para calon pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk mendapatkan akun. Selain itu, Meja e-Court juga dapat mengakomodasi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang mungkin tidak memiliki akses internet untuk dapat mendaftarkan perkaranya.

Gambar 45. Duta E-Court



Meja e-Court PN Simalungun digawangi oleh seorang Duta e-Court yang memiliki pengetahuan mengenai tata cara penggunaan aplikasi e-Court untuk membantu pengguna terdaftar dan pengguna lain yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akun maupun untuk mendaftarkan perkaranya. Duta e-Court juga akan dengan senang hati membantu para pihak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai keuntungan berperkara melalui e-Court.

Bab 6

Pengawasan



B A B VI PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 36/KPN/SK/7/2022 tertanggal 1 Juli 2022.

Tabel 42. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan WASMAT	Penata Tk I/ III/d	Aries Kata Ginting, S.H.
2	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Penata Tk I/ IV/a	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H
3	Hakim Pengawas Bidang Hukum	Penata Tk I/ IV/a	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H
4	Hakim Pengawas Bidang PTIP dan PTSP	Penata Tk I/ III/d	Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H,M.Hum
5	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata Tk I/ III/d	Widi Astuti, S.H.
6	Hakim Pengawas Bidang Keportala	Penata Tk I/ III/d	Yudi Dharma, S.H,M.H

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan
3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. Pengawasan Evaluasi

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022 :

Tabel 43. Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	9
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	4
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	4
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	4
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Pengadilan Tk. Banding	4
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Badan Pengawas MA-RI	4
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	0

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2022 ada 9 (sembilan) laporan dan laporan klarifikasi atas pengaduan tersebut juga sudah diinput pada siwas. Untuk jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin semuanya nihil.

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi perkara
 - a. Prosedur penerimaan permohonan banding, kasasi, dan PK
 - b. Keuangan perkara;
 - c. Pemberkasan kearsipan dan pelaporan.
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - b. Minutasi perkara.
4. Administrasi umum :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan SDM;
 - e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian;



- g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Bab 7

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Simalungun telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2. Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil meraih sertifikat akreditasi penjaminan mutu oleh Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan nilai A (Excellent) yang diserahkan di Makassar pada tanggal 28 November 2018 dan tetap mempertahankan predikat tersebut pada tahun 2022.
3. SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun masih belum memadai secara kuantitas tapi dengan berbagai pembinaan internal dan pola mutasi internal yang dilakukan dengan pendekatan *the right person at the right place*, Pengadilan Negeri Simalungun mampu memberikan performa terbaiknya;
4. Pengelolaan anggaran sudah dilakukan dengan baik yang tercermin dari tercapainya realisasi anggaran di atas 99% baik pada DIPA 01 maupun DIPA 03;
5. Dukungan teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital bagi terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun serta untuk menyukseskan program Mahkamah Agung dalam proses administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik melalui implementasi *e-Court* dan SIPP;
6. E-Berpadu sebagai inovasi terbaru Mahkamah Agung sudah terimplementasi dengan baik sejak 1 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Simalungun.
7. *E-Court* dan SIPP sudah terimplementasi dan secara konsisten dipergunakan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2023 ini, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki beberapa rekomendasi guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparaturnya khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yaitu:

1. Perlu diadakan penambahan tenaga teknis terutama Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat peradilan;
3. Diharapkan usulan anggaran yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan kebutuhan riil dan skala prioritas dapat dikabulkan.
4. sehingga kebutuhan akan perangkat pengolah data dapat dipenuhi demi menunjang keberhasilan administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik;
5. Pemenuhan fasilitas pendukung *e-Litigasi* sudah sangat mendesak untuk dilakukan agar tidak terjadi kendala yang dapat mengganggu kelancaran persidangan secara elektronik;
6. Agar terus diadakan pengembangan terhadap aplikasi yang sudah ada, baik itu pendukung administrasi perkara secara elektronik, maupun aplikasi pendukung tugas kepaniteraan dan kesekretariatan lainnya, sehingga data yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang semakin akurat dan akuntabel.



LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
NOMOR : W11.U9/171/KP.11.01/12/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan 2021 pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas penyusunan laporan tersebut.
- Mengingat : Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 Tanggal 19 Desember 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : **SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN : DI TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 6 DESEMBER 2021


KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

Dr. GUTJARSO, S.H., M.H.
NIP. 196605081992121001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Nomor : W11.U9/171/KP.11.01/12/2021

Tanggal : 6 Desember 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. GUTARSO, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Pembina
2.	SAEPUDIN, S.H.,M.H.	Sekretaris	Ketua
3.	R. SOESANTYO ARIBOWO, S.H.	Panitera	Wakil Ketua
4.	DODO SUHADA, S.H.	Kasub.Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Bidang Non Teknis
5.	HIDAYAT, SH	Kasub.Bag. Umum dan Keuangan	Koordinator Pembuatan/penjilidan Laporan
6.	YAYA HENDAYANA, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	TJAHJUDIN, S.H.M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	EE SUHENDRA, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota
10.	DODI SUPRIADI	PPNPN / Staf PTIP	Anggota
11.	M. ARIEF SANJAYA, S.H,	PPNPN / Staf PTIP	Anggota

/ KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA /

Dr. GUTARSO, S.H., M.H.
NIP. 196605081992121001



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022